

Polarisasi Afektif dalam Percakapan Pemilihan Presiden 2024 di Platform X

Mas Mangaraja Muhamadin^{1*}, Nayla Safitri², Nafisatul Khusniyah³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
 24041614015@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Presiden 2024 memperlihatkan menguatnya polarisasi afektif dalam percakapan politik digital, terutama pada platform X yang memungkinkan pengguna merespons isu elektoral secara cepat melalui reply dan quote tweet. Artikel ini menjelaskan bagaimana polarisasi afektif dimanifestasikan dalam percakapan publik X terkait Pemilihan Presiden 2024. Dengan berpijak pada Teori Identitas Sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif berorientasi netnografi dan Analisis Tematik Refleksif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan dengan fitur X Advanced Search, memakai kata kunci elektoral dan operator rentang waktu, lalu di pilih secara purposif berdasarkan intensitas interaksi dan relevansi tematik. Korpus penelitian terdiri atas 58 kluster percakapan publik yang mencakup unggahan pemantik, reply, dan quote tweet pada periode 28 November 2023 hingga 1 Januari 2025. Data dikurasi secara temporal, tematik, etik, dan deduplikatif, kemudian dianalisis melalui tahap familiarisasi, pengodean awal, pengembangan tema, peninjauan tema, dan interpretasi teoretis. Temuan menunjukkan empat pola utama polarisasi afektif, yaitu hierarkisasi kognitif partisan, purifikasi relasi privat, *schadenfreude* partisan terhadap tragedi kemanusiaan, dan delegitimasi simbolik terhadap institusi elektoral. Keempat pola tersebut memperlihatkan bahwa pilihan politik tidak hanya diperlakukan sebagai preferensi elektoral, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai kecerdasan, moralitas, empati, dan kelayakan sosial seseorang. Artikel ini berargumen bahwa arsitektur interaksi X memperluas polarisasi afektif dari kompetisi elektoral menuju relasi sosial sehari-hari melalui praktik bahasa yang agresif, sarkastik, dan eksklusif.

Kata Kunci: analisis tematik refleksif; komunikasi politik digital; media sosial X; pemilihan presiden; polarisasi afektif

ABSTRACT

The 2024 Indonesian presidential election revealed the intensification of affective polarization in digital political conversations, particularly on X, where replies and quote tweets enable users to respond rapidly to electoral issues. This article explains how affective polarization was manifested in public conversations on X related to the 2024 presidential election. Grounded in Social Identity Theory, this study employed an interpretive qualitative approach with a netnography orientation and Reflexive Thematic Analysis. Data were collected through non-participant observation using X Advanced Search, with electoral keywords and date-range operators, and were then selected purposively based on interaction intensity and thematic relevance. The research corpus consisted of 58 public conversational clusters, including initiating posts, replies, and quote tweets, collected from 28 November 2023 to 1 January 2025. The data were curated temporally, thematically, ethically, and through deduplication, then analyzed through familiarization, initial coding, theme development, theme review, and theoretical interpretation. The findings indicate four main patterns of affective polarization:

partisan cognitive hierarchization, purification of private relationships, partisan schadenfreude toward human tragedy, and symbolic delegitimization of electoral institutions. These patterns show that political choice was treated not merely as an electoral preference but also as a basis for evaluating intelligence, morality, empathy, and social worthiness. The article argues that X's interactional architecture extends affective polarization from electoral competition into everyday social relations through aggressive, sarcastic, and exclusionary language practices.

Keywords: *affective polarization; digital political communication; presidential election; reflexive thematic analysis; social media X*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden 2024 menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan komunikasi politik digital di Indonesia. Kontestasi elektoral tidak hanya berlangsung melalui kampanye formal, debat kandidat, pemberitaan media, dan survei elektabilitas, tetapi juga melalui percakapan sehari-hari di media sosial. Platform X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menjadi ruang tempat pengguna menafsirkan, mendukung, mengejek, membela, atau menyerang kandidat dan kelompok pemilih tertentu. Karakter X yang cepat, terbuka, responsif, dan berbasis interaksi publik menyediakan ruang bagi percakapan politik yang tidak hanya berisi pertukaran opini, tetapi juga ekspresi emosi, sarkasme, dan penegasan batas partisan.

Dalam konteks tersebut, polarisasi politik tidak cukup dipahami sebagai perbedaan pandangan

terhadap kandidat, partai, atau program kebijakan. Polarisasi juga muncul dalam bentuk afeksi negatif terhadap kelompok politik lain. Literatur menyebut gejala ini sebagai polarisasi afektif, yaitu menguatnya kedekatan emosional terhadap kelompok politik sendiri sekaligus meningkatnya ketidaksukaan, kecurigaan, dan jarak sosial terhadap kelompok politik lawan (Lyengar, Lyengar, Lelkes, Levendusky, Malhotra, & Westwood, 2019). Ketika politik diperlakukan sebagai identitas sosial, perbedaan pilihan elektoral dapat berubah menjadi penilaian terhadap karakter, moralitas, kecerdasan, dan kelayakan sosial seseorang (Mason, 2018). (Eli J. Finkel et al, 2020) menyebut kecenderungan ini sebagai *political sectarianism*, yaitu kondisi ketika kelompok politik lawan diposisikan bukan hanya berbeda, tetapi juga dianggap lebih buruk secara moral dan sosial.

Teori Identitas Sosial membantu menjelaskan mengapa pilihan politik dapat berubah menjadi batas sosial yang tajam. (Tajfel & Turner, 1979) menjelaskan bahwa individu membangun identitas melalui keanggotaan kelompok dan cenderung membedakan kelompok sendiri dari kelompok luar. Dalam percakapan politik digital, batas tersebut diproduksi melalui bahasa, seperti label, ejekan, sarkasme, tuduhan, dan klaim superioritas moral. Dengan demikian, polarisasi afektif tidak hanya berlangsung pada level sikap politik, tetapi juga tampil dalam praktik komunikasi sehari-hari.

Media sosial memperkuat dinamika tersebut karena platform digital menyediakan ruang bagi pengguna untuk mempertontonkan posisi politiknya di hadapan audiens. (Bail, 2021) menjelaskan bahwa media sosial dapat bekerja sebagai prisma sosial yang memantulkan sekaligus mendistorsi identitas politik pengguna. Dalam konteks Indonesia, (Lim, 2017) menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk ruang algoritmik yang memperkuat sentimen eksklusif dan identitas politik yang tertutup. Studi tentang media sosial, polarisasi, dan disinformasi juga menegaskan

bahwa platform digital perlu dipahami sebagai lingkungan komunikasi yang ikut membentuk pergerakan informasi, emosi, dan identitas politik (Tucker et al., n.d.).

Batas sosial dalam percakapan politik di X tidak terbentuk secara abstrak, melainkan melalui unsur-unsur yang melekat pada fitur dan kultur platform ini. Salah satunya adalah pelabelan politik. Sebutan seperti "anak abah", "gemoy", atau "paman MK" dipakai untuk menandai kubu tertentu, dan sebutan yang semula berfungsi sebagai identitas kelompok dapat bergeser menjadi cara menstigma. Kajian tentang label "gemoy" di Twitter (X) menunjukkan bahwa sebutan yang muncul dari publik dapat diadopsi menjadi bingkai citra kandidat (Khaq & Wulandari, 2024), sedangkan kajian tentang label "anak abah" memperlihatkan pergeseran makna dari simbol identitas kolektif menjadi alat stigmatisasi dan delegitimasi (Saragih, Ramadhan, & Firliani, 2025). Tagar bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu menghimpun tuduhan atau seruan ke dalam satu penanda yang mudah dibagikan, seperti #BubarkanMK dalam data penelitian ini. Tangkapan layar juga ikut dipakai dalam data, respons kerap

menyertakan tangkapan layar cuitan lain atau pesan grup WhatsApp, sehingga percakapan dari ruang lain ikut dibawa ke dalam utas dan dibaca audiens yang lebih luas. Semua ini berlangsung dalam utas, yakni unggahan pemantik yang diikuti rangkaian reply dan quote tweet. Di dalamnya penilaian terhadap kelompok lawan tidak hanya sampai kepada orang yang dituju, tetapi juga disaksikan pengguna lain. Urutan tampilan respons diatur platform menurut kriteria tertentu, seperti "Relevan", sehingga visibilitas penilaian terhadap kelompok lawan tidak sepenuhnya ditentukan pengguna. Pengaruh algoritma terhadap visibilitas percakapan tidak diukur dalam penelitian ini, tetapi diakui sebagai konteks yang perlu diperhatikan.

Dalam kajian komunikasi di Indonesia, sejumlah artikel dalam Jurnal Komuniti telah menunjukkan bahwa interaksi digital dapat menjadi ruang penting bagi pembentukan emosi, identitas, dan konflik politik. (Gustin, Firmansyah, & Perdana, 2024) menunjukkan bahwa interaksi komentar dalam konteks post-truth dipengaruhi oleh emosi, keyakinan pribadi, sarkasme, dan ketidakpercayaan. (Haryanti, 2025)

memperlihatkan bagaimana akun X dapat digunakan untuk membangun identitas dan ideologi melalui strategi wacana digital. (Hidayat, 2025) menunjukkan bahwa komunikasi politik kontemporer di Indonesia berkaitan dengan narasi populis, polarisasi digital, dan konstruksi relasi antara pemimpin dan publik.

Sejumlah kajian tentang politik digital telah banyak menyoroti polarisasi melalui pemetaan jaringan, penyebaran informasi, sentimen, disinformasi, atau narasi politik pada level makro. Namun, ruang yang masih perlu diperkuat adalah pembacaan mikro terhadap bagaimana polarisasi afektif diproduksi melalui praktik bahasa pengguna, terutama dalam *reply* dan *quote tweet*. Dua fitur ini penting karena memperlihatkan bukan hanya posisi politik pengguna, tetapi juga cara pengguna memperlakukan, menyindir, menolak, atau menegaskan batas sosial terhadap kelompok politik lain di hadapan audiens digital.

Artikel ini memosisikan reply dan quote tweet sebagai ruang performatif tempat identitas politik dinegosiasikan dan dipertentangkan. Dalam percakapan terkait Pemilihan Presiden 2024, pilihan politik kerap bergerak

dari preferensi elektoral menjadi dasar penilaian terhadap kecerdasan, moralitas, empati, dan kelayakan sosial seseorang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan mikro terhadap reply dan quote tweet sebagai ruang performatif polarisasi afektif dalam percakapan publik X. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana polarisasi afektif dimanifestasikan dalam percakapan politik di platform X melalui reply dan quote tweet terkait Pemilihan Presiden 2024? Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola-pola utama polarisasi afektif dalam percakapan publik X serta menjelaskan bagaimana praktik bahasa digital memperluas konflik elektoral ke dalam penilaian sosial, moral, dan relasional.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibangun di atas tiga kerangka konseptual utama: polarisasi afektif, Teori Identitas Sosial, dan media sosial sebagai ruang performatif komunikasi politik digital. Ketiga kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana percakapan politik di platform X tidak hanya merekam perbedaan pilihan elektoral, tetapi juga memproduksi batas sosial

antara kelompok politik sendiri dan kelompok politik lawan.

Polarisasi afektif berbeda dari polarisasi ideologis. Polarisasi ideologis terutama berkaitan dengan perbedaan sikap terhadap isu, kebijakan, atau orientasi politik. Sementara itu, polarisasi afektif merujuk pada menguatnya kedekatan emosional terhadap kelompok politik sendiri dan meningkatnya ketidaksukaan terhadap kelompok politik lawan (Iyengar et al., 2019). Dalam situasi ini, lawan politik tidak hanya dilihat sebagai pihak yang memiliki preferensi berbeda, tetapi juga sebagai kelompok yang dianggap lebih buruk secara moral, sosial, atau intelektual. (Eli J. Finkel et al, 2020) menjelaskan kecenderungan ini sebagai *political sectarianism*, yaitu persaingan politik yang ditandai oleh *othering*, *aversion*, dan *moralization*.

Teori Identitas Sosial memberikan dasar untuk memahami mekanisme tersebut. (Tajfel & Turner, 1979) menjelaskan bahwa individu membangun identitas melalui keanggotaan kelompok dan cenderung membedakan kelompok sendiri dari kelompok luar. Dalam konteks elektoral, kategori seperti

pendukung kandidat, pemilih nomor urut tertentu, atau kelompok politik tertentu dapat berfungsi sebagai identitas sosial. Identitas ini kemudian melahirkan kecenderungan *in-group favoritism*, yaitu penilaian positif terhadap kelompok sendiri, dan *out-group derogation*, yaitu penilaian negatif terhadap kelompok lawan. (Mason, 2018) menegaskan bahwa ketika politik berubah menjadi identitas sosial, konflik politik dapat meluas ke ranah kehidupan sehari-hari dan relasi sosial di luar arena elektoral.

Dalam percakapan politik digital, batas *in-group* dan *out-group* diproduksi melalui bahasa. Label seperti bodoh, tidak rasional, tidak bermoral, tidak berempati, atau tidak layak dipercaya tidak hanya berfungsi sebagai hinaan personal, tetapi juga sebagai penanda batas kelompok. Dengan demikian, polarisasi afektif dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang mengubah perbedaan pilihan politik menjadi hierarki sosial. Kelompok sendiri diposisikan sebagai lebih rasional dan bermoral, sedangkan kelompok lawan diposisikan sebagai lebih rendah secara intelektual atau etis.

Media sosial menyediakan ruang bagi pengguna untuk mempertontonkan posisi politiknya di hadapan audiens. (Bail, 2021) menjelaskan bahwa media sosial dapat bekerja sebagai prisma sosial yang memantulkan sekaligus mendistorsi identitas politik pengguna. Dalam konteks Indonesia, (Lim, 2017) menunjukkan bahwa ruang digital dapat membentuk enclaves algoritmik yang memperkuat sentimen eksklusif dan identitas politik yang tertutup. Pada platform X, fitur reply memungkinkan pengguna merespons langsung unggahan pemantik, sedangkan quote tweet memungkinkan pengguna membingkai ulang unggahan lain di hadapan audiensnya sendiri. Dua fitur ini membuat percakapan politik di X tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga performatif.

Fenomena *echo chamber* dan *post-truth* juga relevan untuk memahami percakapan politik digital. (Tucker et al., n.d.) menjelaskan bahwa media sosial, polarisasi politik, dan disinformasi saling berkaitan dalam membentuk lingkungan informasi yang rentan terhadap fragmentasi. (Cinelli, De Francisci Morales, Galeazzi, Quattrociocchi, & Starnini, 2021)

menunjukkan bahwa echo chamber dapat memperkuat keterpaparan terhadap informasi yang sejalan dengan keyakinan kelompok. Dalam konteks Jurnal Komuniti, (Gustin et al., 2024) menunjukkan bahwa interaksi komentar dalam konteks post-truth dipengaruhi oleh emosi, keyakinan pribadi, sarkasme, dan ketidakpercayaan terhadap sumber informasi. Namun, artikel ini tidak memosisikan teknologi sebagai satu-satunya penyebab polarisasi. Fitur platform seperti reply dan quote tweet tidak otomatis menciptakan permusuhan, tetapi menyediakan ruang bagi permusuhan tersebut untuk ditampilkan, disirkulasikan, dan divalidasi secara publik.

Dimensi sosial polarisasi afektif tampak dalam relasi privat. (Huber & Malhotra, 2017) menunjukkan bahwa kesamaan politik dapat berpengaruh dalam hubungan sosial dan preferensi relasional. Dalam konteks ini, pilihan politik dapat menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang layak dijadikan teman, pasangan, atau bagian dari jaringan sosial tertentu. Selain itu, polarisasi afektif juga dapat dipahami melalui cara pengguna memperlakukan klaim pengetahuan dan batas moral kelompok. (Porter &

Schumann, 2018) menjelaskan bahwa *intellectual humility* berkaitan dengan kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan dan terbuka terhadap pandangan berbeda. Sebaliknya, (Lynch, 2018) menunjukkan bahwa arogansi epistemik muncul ketika seseorang merasa memiliki otoritas berlebih untuk menentukan kebenaran dan rasionalitas.

Pada level relasi digital, tindakan menyaring, memutus, atau membatasi interaksi dengan kelompok lawan perlu dibaca secara hati-hati. (Martel, Mosleh, Yang, Zaman, & Rand, 2024) menunjukkan bahwa praktik memblokir akun lawan politik dapat meningkatkan keterpilahan politik dalam jaringan Twitter. Namun, penelitian ini tidak mengukur jaringan pemblokiran secara kuantitatif, sehingga konsep tersebut digunakan sebagai konteks interpretif, bukan bukti kausal. Dalam konteks yang lebih luas, (Norris, 2023) menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan konsep yang diperdebatkan, baik sebagai bentuk akuntabilitas sosial maupun sebagai praktik penghukuman sosial yang berlebihan.

Polarisasi afektif juga dapat melemahkan empati terhadap

kelompok lawan. (Au & Ho, 2022) menjelaskan bahwa *schadenfreude* online dapat muncul ketika polarisasi membuat kemalangan pihak lain dipersepsi sebagai sumber kepuasan simbolik. (Grizzard, Frazer, & Monge, 2023) juga menunjukkan bahwa respons terhadap kemalangan pihak lain di media sosial dapat dipengaruhi oleh disposisi moral dan afeksi terhadap kelompok yang menjadi objek pembicaraan. Selain itu, ketika institusi elektoral diasosiasikan dengan kelompok politik lawan, kritik terhadap prosedur dapat bergeser menjadi delegitimasi simbolik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini membaca empat pola utama: hierarkisasi kognitif partisan, purifikasi relasi privat, *schadenfreude* partisan terhadap tragedi kemanusiaan, dan delegitimasi simbolik terhadap institusi elektoral.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan orientasi netnografi. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa percakapan digital yang muncul dalam ruang publik platform X. Dalam penelitian ini, ruang digital dipahami sebagai arena sosial tempat identitas politik ditampilkan,

dinegosiasikan, dan dipertentangkan. Orientasi netnografi digunakan untuk memahami praktik komunikasi, ekspresi emosi, dan relasi antar-kelompok yang terbentuk melalui interaksi pengguna di lingkungan digital (Forberg & Schilt, 2023; Kozinets, 2019). Istilah orientasi netnografi digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian ini membaca percakapan X sebagai praktik sosial digital, bukan sebagai survei opini atau pemetaan jaringan. Karena penelitian berfokus pada teks reply dan quote tweet yang tersedia secara publik, posisi peneliti bersifat non-partisipan dan tidak diarahkan untuk mengklaim pengalaman internal pengguna. Penerapan netnografi dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu penentuan medan dan konteks percakapan, observasi lapangan digital (*cyber-fieldwork*), perekaman data, dan kurasi data.

Tahap pertama adalah menentukan medan dan konteks percakapan, Data primer penelitian berupa teks percakapan publik pada platform X yang terdiri atas unggahan pemantik, reply, dan quote tweet terkait Pemilihan Presiden 2024. Medan penelitian dibatasi pada unggahan pemantik beserta reply dan

quote tweet karena kedua fitur ini memperlihatkan cara pengguna menanggapi, membingkai ulang, dan menegaskan posisi politiknya di hadapan audiens. Rentang waktu korpus utama ditetapkan dari 28 November 2023 hingga 1 Januari 2025. Periode ini dipilih karena mencakup masa kampanye resmi, pemungutan suara, rekapitulasi, sengketa hasil, transisi pasca-elektoral, dan percakapan awal setelah pemerintahan baru berjalan. Data di luar rentang tersebut tidak dimasukkan sebagai korpus utama agar batas temporal penelitian tetap konsisten.

Tahap kedua adalah observasi lapangan digital (*cyber-fieldwork*), pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan menggunakan fitur X Advanced Search. Peneliti tidak berinteraksi dengan pengguna, tidak memberi komentar, dan tidak memengaruhi jalannya percakapan. Pemilihan data dilakukan secara purposif dengan menargetkan klaster percakapan yang memperlihatkan intensitas interaksi dan relevansi tematik dengan polarisasi afektif. Kata kunci pencarian mencakup istilah elektoral, label partisan, dan ungkapan yang sering muncul dalam percakapan politik X, seperti "01

voters", "02 voters", "03 voters", "IQ 58", "anak abah", "paman MK", "Mahkamah Keluarga", "kalah pilpres", "satu putaran", dan "kecurangan pilpres". Setiap kata kunci dikombinasikan dengan operator rentang waktu berformat *since:tahun-bulan-tanggal* dan *until:tahun-bulan-tanggal*, sehingga penelusuran dibatasi pada periode penelitian. Seluruh hasil penelusuran dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disaring dan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Parameter minimum 40 balasan digunakan sebagai indikator awal untuk memilih percakapan yang memiliki intensitas interaksi relatif tinggi, bukan sebagai ukuran representativitas seluruh percakapan politik di X. Dengan demikian, korpus penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh percakapan politik di X, melainkan untuk membaca pola polarisasi afektif dalam klaster percakapan berintensitas tinggi.

Dari proses seleksi tersebut dihipotesiskan 58 klaster percakapan publik. Setiap klaster terdiri atas satu unggahan pemantik dan sejumlah reply atau quote tweet yang relevan dengan isu polarisasi afektif.

Tahap ketiga adalah perekaman data budaya digital, data yang direkam berupa teks percakapan beserta bentuk kebahasaannya, seperti label, ejekan, sarkasme, slang, dan campuran bahasa yang membawa muatan afektif. Data didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar dan transkrip teks untuk memudahkan proses pembacaan, pengodean, dan penelusuran ulang. Tangkapan layar menyimpan tampilan percakapan sebagaimana terlihat di ruang publik, sedangkan bentuk kebahasaan asli pengguna dipertahankan dalam transkrip teks.

Tahap keempat adalah kurasi data, data dikurasi secara temporal, tematik, etik, dan deduplikatif. Kurasi temporal dilakukan dengan menyingkirkan percakapan di luar periode penelitian. Kurasi tematik dilakukan dengan memilih percakapan yang memuat ekspresi penilaian negatif, jarak sosial, penghinaan, sarkasme, atau delegitimasi terhadap kelompok politik lain. Kurasi etik dilakukan dengan menghapus atau menyamarkan identitas akun, tautan, foto profil, dan informasi personal. Kurasi deduplikatif dilakukan dengan menghindari penggunaan data yang sama secara berulang dalam analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Tematik Refleksif sebagaimana dikembangkan oleh (Braun & Clarke, 2019) serta dijelaskan secara aplikatif oleh (Byrne, 2022). Proses analisis dilakukan melalui familiarisasi data, penyusunan kode awal, pengembangan tema kandidat, peninjauan tema, penamaan tema, dan interpretasi teoretis. Dalam Analisis Tematik Refleksif, tema tidak diperlakukan sebagai hasil penghitungan frekuensi semata, melainkan sebagai pola makna yang dibangun melalui pembacaan berulang dan interpretasi reflektif terhadap data. Kredibilitas analisis dijaga melalui konsistensi hubungan antara data, kode, tema, dan kerangka teoretis, bukan melalui klaim reliabilitas antar-koder.

Pengodean dilakukan secara induktif dengan tetap memperhatikan fokus konseptual penelitian tentang polarisasi afektif. Kode awal mencakup, antara lain, "kebodohan partisan", "superioritas moral", "filter pasangan", "putus relasi", "candaan tragedi", "sinisme terhadap MK", "ketidakpercayaan terhadap KPU", dan "kelelahan terhadap konflik horizontal". Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat tema

utama: hierarkisasi kognitif partisan, purifikasi relasi privat, schadenfreude partisan terhadap tragedi kemanusiaan, dan delegitimasi simbolik terhadap institusi elektoral. Tema tidak diperlakukan sebagai kategori yang sepenuhnya kaku dan saling terpisah karena satu unit percakapan dapat memuat lebih dari satu pola makna. Karena itu, setiap kutipan ditempatkan pada tema yang paling dominan berdasarkan fungsi wacananya.

Pertimbangan etis mengikuti prinsip etika riset internet dari Association of Internet Researchers sebagaimana dirumuskan oleh (Franzke, Bechmann, Zimmer, & Ess, 2020). Meskipun data berasal dari percakapan publik, identitas akun tetap dianonimkan untuk mengurangi risiko pelacakan, perundungan, atau persekusi digital. Nama pengguna, tautan unggahan, foto profil, dan detail personal tidak dicantumkan dalam artikel. Kutipan dari X ditampilkan dengan mempertahankan bentuk bahasa asli pengguna, termasuk ejaan, kapitalisasi, campuran bahasa, slang, dan tanda baca, sejauh unsur tersebut relevan untuk analisis. Perubahan hanya dilakukan untuk kepentingan etik, seperti penghapusan nama akun,

handle, tautan, foto profil, atau informasi personal yang dapat mengarah pada identifikasi pengguna. Jika bagian tertentu dihapus, penghilangan ditandai dengan [...]. Gambar tangkapan layar yang digunakan dalam artikel telah dianonimkan dengan menyamarkan identitas akun dan elemen visual yang tidak diperlukan untuk analisis.

D. TEMUAN

Analisis terhadap 58 kluster percakapan politik di platform X menunjukkan bahwa ekspresi dukungan elektoral tidak hanya muncul sebagai pernyataan pilihan politik, tetapi juga sebagai mekanisme penilaian sosial terhadap kelompok lain. Percakapan yang diamati memperlihatkan bagaimana pengguna menilai kecerdasan, moralitas, empati, dan kelayakan sosial seseorang berdasarkan pilihan politiknya. Dari proses pengodean, ditemukan empat pola utama polarisasi afektif: hierarkisasi kognitif partisan, purifikasi relasi privat, schadenfreude partisan terhadap tragedi kemanusiaan, dan delegitimasi simbolik terhadap institusi elektoral.

Kutipan dalam bagian ini disajikan sebagaimana muncul dalam

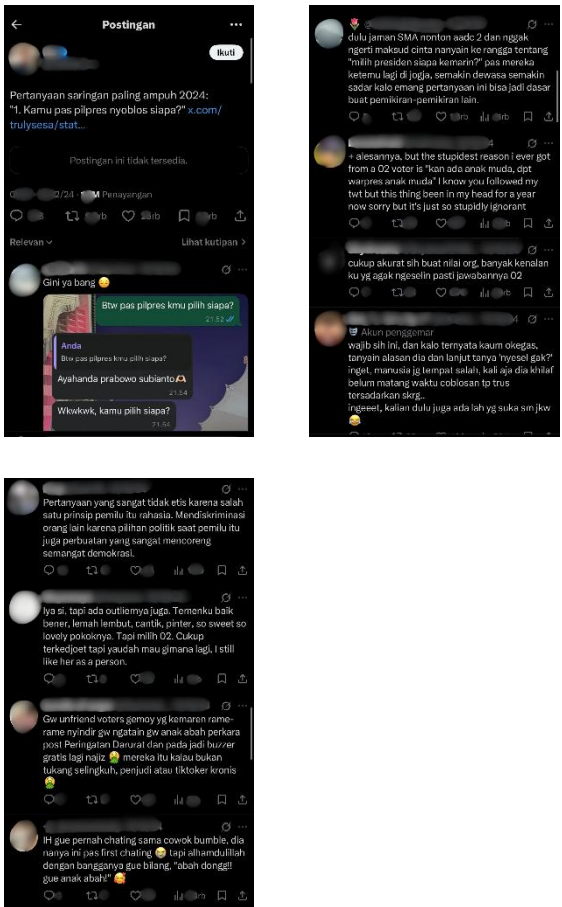
data, termasuk penggunaan slang, campuran bahasa, huruf kapital, ejaan tidak baku, dan tanda baca. Penyajian tersebut dilakukan untuk menjaga autentisitas ekspresi afektif pengguna. Identitas akun, tautan, dan elemen yang memungkinkan pelacakan pengguna telah dianonimkan.

Tabel 1. Tema Utama Temuan Penelitian

N o	Tema	Fokus Pola Komunika si	Contoh Kode Awal
1	Hierarkisasi kognitif partisan	Pilihan politik dipakai untuk menilai kapasitas berpikir kelompok lain	IQ rendah, bodoh, tidak rasional, malas berpikir
2	Purifikasi relasi privat	Pilihan politik dijadikan dasar menyaring atau memutus relasi sosial	Filter pasangan, unfriend, boikot, tidak sejalan
3	Schadenfreude partisan	Tragedi atau kemalangan digunakan sebagai bahan ejekan politik	candaan gempu, hilangnya empati, tawa atas musibah
4	Delegitimasi simbolik institusi elektoral	Lembaga pemilu dan hukum dibingkai melalui label sinis	paman MK, Mahkamah Keluarga, KPU tidak serius,

Bubarkan MK
Sumber: Olahan peneliti berdasarkan korpus percakapan publik X periode 28 November 2023-1 Januari 2025.

Contoh klaster pada Gambar 1 memperlihatkan bagaimana unggahan pemantik tentang pertanyaan pilihan Pilpres 2024 memunculkan beragam respons, mulai dari persetujuan untuk menjadikan pilihan politik sebagai dasar penyaringan relasi hingga penolakan terhadap diskriminasi berdasarkan pilihan politik.



Gambar 1. Panel tangkapan layar klaster percakapan X tentang penyaringan relasi berdasarkan pilihan

politik. (Sumber : Dokumentasi peneliti dari percakapan publik X yang telah dianonimkan, 2024.)

1. Hierarkisasi Kognitif Partisan

Tema pertama menunjukkan kecenderungan pengguna X menjadikan pilihan politik sebagai dasar untuk menilai kapasitas berpikir kelompok lain. Dalam pola ini, lawan politik tidak hanya dikritik karena pilihan kandidatnya, tetapi juga ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap kurang cerdas, tidak rasional, atau tidak mampu memahami situasi politik. Dengan demikian, perbedaan pilihan elektoral berubah menjadi hierarki kognitif: kelompok sendiri diposisikan sebagai lebih rasional, sedangkan kelompok lawan ditempatkan sebagai pihak yang lebih rendah secara intelektual.

Pola ini tampak dalam klaster percakapan yang membahas kritik terhadap pendukung kandidat tertentu. Salah satu pengguna menulis:

"Rasional tololnya"

Dalam klaster yang sama, Akun-X01 menulis:

"sy dukung makan siang gratis agar generasi IQ 58 bisa dibasmi sesegera mungkin"

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa label seperti "rasional", "tolol", dan "IQ 58" digunakan untuk membingkai kelompok politik lawan sebagai pihak yang rendah secara kognitif. Istilah "IQ 58" tidak berfungsi sebagai penilaian faktual, melainkan sebagai simbol penghinaan yang mengaitkan pilihan politik dengan kapasitas intelektual. Bahkan, penggunaan kata "dibasmi" memperlihatkan bahwa sarkasme politik dapat bergerak ke arah bahasa eliminatif, meskipun muncul dalam konteks percakapan digital.

Pola serupa muncul ketika pilihan politik seseorang dipahami sebagai usaha untuk terlihat lebih pintar. Dalam klaster lain, Akun-X02 menulis:

"Gua punya temen voters 01 tapi dia goblok.
Gimana dong?
Alasan dia milih 01 aja karena biar dianggap pintar"

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pilihan politik tidak dibaca sebagai hasil pertimbangan elektoral yang kompleks. Pilihan politik justru dipersempit menjadi tanda dari motif sosial dan kapasitas berpikir seseorang. Lawan politik tidak diposisikan sebagai warga dengan preferensi berbeda,

tetapi sebagai individu yang dianggap memiliki motif dangkal dan kemampuan berpikir rendah.

2. Purifikasi Relasi Privat

Tema kedua menunjukkan bahwa polarisasi afektif tidak berhenti pada ruang debat politik, tetapi masuk ke ranah relasi privat. Pilihan politik dijadikan dasar untuk menilai apakah seseorang layak dijadikan teman, pasangan, rekan interaksi, atau bagian dari jaringan sosial tertentu. Dalam pola ini, relasi sosial dipahami sebagai ruang yang perlu disaring dari pihak yang dianggap memiliki pilihan politik bermasalah.

Salah satu bentuk purifikasi relasi muncul dalam percakapan tentang pasangan dan kecocokan nilai politik. Akun-X03 menulis:

"Kalo gue sih jalur boikot dan pilpres. Kalo 2 itu aja ga sejalan skip."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik ditempatkan sejajar dengan isu boikot sebagai batas nilai dalam relasi. Ketidaksejajaran politik tidak dipahami sebagai perbedaan biasa, tetapi sebagai alasan untuk menghindari atau menghentikan potensi hubungan.

Pola serupa muncul dalam tindakan memutus koneksi digital. Akun-X04 menulis:

"Gw unfriend voters gemoy yg kemaren rame-rame nyindir gw ngatain gw anak abah perkara post Peringatan Darurat dan pada jadi buzzer gratis lagi najiz 🤔 mereka itu kalau bukan tukang selingkuh, penjudi atau tiktoker kronis 🤔"

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pemutusan relasi digital tidak hanya didasarkan pada perbedaan pilihan politik. Di dalamnya terdapat generalisasi moral terhadap kelompok lawan, seperti mengaitkan pilihan politik dengan perilaku yang dianggap menyimpang atau rendah secara moral. Praktik "unfriend" dalam kutipan ini menjadi bentuk purifikasi jaringan sosial, yaitu upaya membersihkan ruang digital pribadi dari kelompok yang dinilai tidak sejalan secara politik dan moral.

Data juga menunjukkan adanya respons tandingan. Dalam klaster yang sama, Akun-X05 menulis:

"Pertanyaan yang sangat tidak etis karena salah satu prinsip pemilu itu rahasia. Mendiskriminasi orang lain karena pilihan politik saat pemilu itu juga perbuatan yang sangat mencoreng semangat demokrasi."

Respons tersebut menunjukkan bahwa ruang X tidak sepenuhnya

homogen. Di tengah ekspresi penolakan sosial terhadap pemilih lain, terdapat pula pengguna yang mempertahankan prinsip kerahasiaan pilihan politik dan menolak diskriminasi berbasis preferensi elektoral. Meskipun demikian, pola dominan dalam tema ini tetap memperlihatkan bahwa pilihan politik kerap diperlakukan sebagai indikator nilai personal.

3. Schadenfreude Partisan terhadap Tragedi Kemanusiaan

Tema ketiga menunjukkan munculnya *schadenfreude* partisan, yaitu penggunaan tragedi atau kemalangan sebagai bahan ejekan politik. Pola ini tampak dalam klaster percakapan tentang gempa bumi yang dikaitkan dengan figur politik tertentu. Peristiwa yang semestinya memunculkan kepedulian justru dibingkai sebagai bahan humor politik untuk menyindir pihak yang diasosiasikan dengan lawan elektoral.

Akun-X06 menulis:

"Gempa tadi katanya pusatnya dari rumah si ndut, dia lompat-lompat bahagia menang pilpres"

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa bencana dipindahkan dari konteks kemanusiaan menuju konteks ejekan politik. Fokus

percakapan tidak diarahkan pada dampak gempa atau keselamatan warga, tetapi pada sindiran terhadap figur politik yang dibenci.

Namun, data juga memperlihatkan bahwa candaan tersebut mendapat penolakan dari pengguna lain. Akun-X07 menulis:

"Maaf bgt, tapi kali ini nggak lucu bercandaan gini 🙄"

Akun-X08 juga menulis:

"Tolol dah tau ada musibah, malah dijadiin candaan. Coba rumah lu yang kena gempa masih bisa bikin ginian ga?"

Respons lain memperlihatkan keberatan yang lebih langsung terhadap hilangnya empati. Akun-X09 menulis:

"Ga lucu bgt, ini musibah bukan bercandaan anjir, empati lu dmn coy?"

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa *schadenfreude* partisan tidak diterima secara seragam. Sebagian pengguna menolak candaan karena dianggap melampaui batas etik. Dengan demikian, *schadenfreude* partisan dalam data ini tidak selalu berbentuk kegembiraan langsung atas penderitaan korban, melainkan penggunaan peristiwa tragis sebagai bahan ekspresi politik yang menggeser

perhatian dari empati publik menuju ejekan partisan.

4. Delegitimasi Simbolik terhadap Institusi Elektoral

Tema keempat menunjukkan bahwa polarisasi afektif tidak hanya diarahkan kepada pemilih atau kandidat, tetapi juga kepada institusi elektoral. Dalam sejumlah klaster, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, dan lembaga survei dibicarakan melalui bahasa sinis yang meragukan kewibawaan serta netralitasnya. Kritik terhadap institusi demokrasi pada dasarnya merupakan bagian sah dari ruang publik. Namun, dalam data ini, kritik kerap bergeser menjadi delegitimasi simbolik melalui label sarkastik, tuduhan total, dan penolakan terhadap otoritas institusi.

Pola pertama terlihat dalam penggunaan narasi keluarga dan kedekatan kekuasaan untuk membingkai institusi elektoral. Dalam salah satu klaster, Akun-X10 menulis:

"Tenang saja, Pak Prabowo. Ada saya di sini. Saya, anak Presiden Jokowi, konconya Pak Prabowo. Saya keponakannya Paman Usman di MK. Bapakku yang punya MK, bersama Paman Usman, juga KPU, dan Bawaslu, juga KPK. Tanpa koncoisme, kolusi dan nepotisme, saya tak mungkin bisa

cawapres mendampingi Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tak mungkin menang."

Kutipan tersebut tidak hanya menyerang figur politik tertentu, tetapi juga membingkai beberapa institusi negara sebagai bagian dari jaringan keluarga dan kepentingan politik. Institusi tidak lagi dipersepsikan sebagai lembaga prosedural yang netral, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang diasosiasikan dengan kelompok tertentu.

Pola kedua muncul dalam percakapan tentang persidangan dan putusan elektoral. Akun-X11 menulis:

"Emangnya sidang di [akun MK] itu penting?? Buat [akun KPU] gak.. toh hasilnya bisa di atur.. mudah itu.. tinggal bayar ordal saja.."

Kutipan tersebut memperlihatkan delegitimasi langsung terhadap Mahkamah Konstitusi dan KPU. Institusi hukum dan penyelenggara pemilu dipersepsikan tidak memiliki otoritas substantif karena hasilnya dianggap dapat diatur melalui kepentingan internal.

Pola ketiga tampak dalam penggunaan label sarkastik terhadap Mahkamah Konstitusi. Akun-X12 menulis:

"Memangnya [akun MK] penting Igi, Ngga Penting dan Ngga Guna

Igi. Sudah jdi "Mahkamah Laundry Suara". Bagian dri "Perusak system politik dan Hukum"Indonesia. MK sdh jdi Proxy2 yg ingin Negara ini Bubar.
#BubarkanMK"

Ungkapan "Mahkamah Laundry Suara" menunjukkan bagaimana nama institusi diubah menjadi sindiran yang mengasosiasikan lembaga dengan manipulasi suara. Seruan "#BubarkanMK" juga menunjukkan bahwa delegitimasi tidak hanya diarahkan pada putusan, tetapi pada keberadaan institusi itu sendiri.

Contoh klaster pada Gambar 2 memperlihatkan bagaimana unggahan pemantik tentang kritik terhadap KPU dalam persidangan MK memunculkan respons yang tidak hanya mengkritik prosedur elektoral, tetapi juga meragukan fungsi dan kewibawaan institusi seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi.



Gambar 2. Panel tangkapan layar klaster percakapan X tentang

delegitimasi simbolik terhadap institusi electoral. (Sumber: Dokumentasi peneliti dari percakapan publik X yang telah dianonimkan, 2024.)

Temuan ini menunjukkan bahwa polarisasi afektif dapat memperluas objek permusuhan dari kelompok pemilih menuju institusi demokrasi. Ketika institusi diasosiasikan dengan kelompok politik lawan, keputusan formal menjadi sulit diterima sebagai hasil prosedural. Namun, tidak semua kritik terhadap institusi elektoral merupakan delegitimasi. Kritik berbasis data, prosedur, dan argumentasi hukum tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Fokus tema ini adalah penggunaan label simbolik dan tuduhan total yang meruntuhkan otoritas institusi tanpa selalu disertai argumentasi prosedural yang memadai.

Secara keseluruhan, keempat tema tersebut menunjukkan bahwa polarisasi afektif di platform X bekerja melalui praktik bahasa yang menilai, menyaring, mengejek, dan mendelegitimasi. Pilihan politik tidak hanya diperlakukan sebagai preferensi elektoral, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan siapa yang dianggap cerdas, bermoral, berempati,

layak diajak berelasi, dan layak dipercaya. Meskipun demikian, data juga menunjukkan adanya respons tandingan berupa teguran terhadap candaan tragedi, kritik terhadap diskriminasi pilihan politik, dan ajakan untuk tidak terus memelihara konflik horizontal.

E. BAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi afektif dalam percakapan politik di platform X tidak hanya bekerja sebagai perbedaan preferensi elektoral, tetapi juga sebagai proses pembentukan batas sosial. Pilihan politik digunakan untuk menilai kecerdasan, moralitas, empati, serta kelayakan seseorang dalam relasi sosial. Dengan demikian, konflik elektoral tidak berhenti pada perdebatan mengenai kandidat, program, atau institusi pemilu, tetapi berkembang menjadi mekanisme pengelompokan antara "kami" dan "mereka". Pola ini sejalan dengan penjelasan (Iyengar et al., 2019) bahwa polarisasi afektif ditandai oleh menguatnya kedekatan terhadap kelompok politik sendiri dan meningkatnya ketidaksukaan terhadap kelompok politik lawan.

Tema hierarkisasi kognitif partisan memperlihatkan bahwa pilihan politik kerap dipakai untuk menilai kualitas nalar kelompok lain. Label seperti "IQ 58", "goblok", atau "tidak rasional" tidak hanya berfungsi sebagai hinaan personal, tetapi juga sebagai alat untuk menempatkan kelompok lawan pada posisi intelektual yang lebih rendah. Dalam perspektif Teori Identitas Sosial, pola ini menunjukkan proses in-group favoritism dan out-group derogation sebagaimana dijelaskan oleh (Tajfel & Turner, 1979). Pola tersebut juga dapat dibaca melalui konsep *intellectual humility* dan arogansi epistemik. (Porter & Schumann, 2018) menjelaskan bahwa *intellectual humility* berkaitan dengan kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan, sedangkan (Lynch, 2018) menunjukkan bahwa arogansi epistemik muncul ketika seseorang merasa berhak menentukan standar kebenaran dan rasionalitas secara sepihak.

Tema purifikasi relasi privat menunjukkan bahwa polarisasi afektif merembes ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pilihan politik dijadikan dasar untuk menyaring teman, pasangan, pekerja, atau jaringan digital. Praktik seperti unfriend, boikot

relasi, atau penolakan terhadap pasangan yang berbeda pilihan memperlihatkan bahwa preferensi elektoral dapat berubah menjadi kriteria kelayakan sosial. Temuan ini memperluas pembahasan (Huber & Malhotra, 2017) mengenai political homophily, yaitu kecenderungan individu membangun relasi dengan pihak yang memiliki kesamaan politik. Dalam konteks penelitian ini, kesamaan politik tidak hanya menjadi sumber kenyamanan sosial, tetapi juga berubah menjadi batas moral untuk menerima atau menolak orang lain.

Dalam ruang digital, purifikasi relasi privat tidak hanya berlangsung sebagai keputusan personal, tetapi juga sebagai performa publik. Ketika pengguna menyatakan bahwa ia memutuskan relasi dengan pemilih tertentu, pernyataan itu sekaligus menunjukkan posisi moralnya di hadapan audiens. Fitur seperti reply, quote tweet, unfriend, block, dan mute membuat tindakan menyaring relasi dapat ditampilkan sebagai bagian dari ekspresi politik. (Martel et al., 2024) menunjukkan bahwa tindakan memblokir akun lawan politik dapat meningkatkan keterpilahan politik dalam jaringan Twitter. Temuan ini juga bersinggungan dengan logika cancel

culture, meskipun istilah tersebut digunakan secara terbatas. (Norris, 2023) menunjukkan bahwa cancel culture diperdebatkan antara bentuk akuntabilitas sosial dan praktik penghukuman sosial yang berlebihan.

Tema *schadenfreude* partisan terhadap tragedi kemanusiaan memperlihatkan bagaimana polarisasi afektif dapat mengganggu sensitivitas empatik. Candaan tentang gempa yang dikaitkan dengan figur politik menunjukkan bahwa peristiwa tragis dapat dipindahkan dari konteks kemanusiaan ke dalam arena ejekan partisan. Temuan ini sejalan dengan (Au & Ho, 2022), yang menunjukkan bahwa *schadenfreude* online dapat muncul dalam konteks polarisasi ideologis. (Grizzard et al., 2023) juga menunjukkan bahwa respons terhadap kemalangan pihak lain di media sosial dapat dipengaruhi oleh disposisi moral dan afeksi terhadap kelompok yang menjadi objek pembicaraan. Namun, data penelitian ini juga memperlihatkan adanya batas etik yang masih dipertahankan oleh sebagian pengguna melalui penolakan terhadap candaan bencana.

Tema delegitimasi simbolik terhadap institusi elektoral

menunjukkan bahwa objek polarisasi afektif tidak hanya mencakup pemilih dan kandidat, tetapi juga lembaga demokrasi. Istilah seperti "Paman Usman di MK", "Mahkamah Laundry Suara", atau seruan "Bubarkan MK" memperlihatkan bagaimana institusi elektoral dibicarakan melalui bahasa sinis dan sarkastik. Dalam konteks ini, institusi tidak hanya dikritik berdasarkan prosedur atau keputusan tertentu, tetapi juga diasosiasikan dengan kelompok politik yang dianggap lawan. Akibatnya, otoritas kelembagaan menjadi sulit dipisahkan dari afeksi partisan.

Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap institusi elektoral bukanlah masalah dalam demokrasi. Kritik terhadap KPU, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, atau lembaga survei dapat menjadi bagian dari kontrol publik, terutama ketika didasarkan pada data, prosedur hukum, dan argumentasi yang dapat diuji. Yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah pergeseran dari kritik substantif menuju delegitimasi simbolik. Pergeseran tersebut terjadi ketika institusi dilabeli secara total sebagai tidak berguna, tidak sah, atau sepenuhnya dikendalikan kelompok tertentu tanpa

argumentasi prosedural yang memadai.

Temuan ini dapat dibaca dalam konteks post-truth dan fragmentasi informasi. (Tucker et al., n.d.) menjelaskan bahwa media sosial, polarisasi politik, dan disinformasi saling berkaitan dalam membentuk lingkungan informasi yang rentan terhadap fragmentasi. Dalam konteks Indonesia, (Lim, 2017) menunjukkan bahwa ruang digital dapat membentuk enclaves algoritmik yang memperkuat sentimen eksklusif dan identitas politik yang tertutup. (Gustin et al., 2024), (Haryanti, 2025), dan (Hidayat, 2025) juga membantu menempatkan temuan ini dalam kajian komunikasi digital Indonesia, terutama terkait emosi, identitas, strategi wacana, dan polarisasi komunikasi politik.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi afektif di platform X bekerja melalui empat mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, hierarkisasi kognitif membuat pilihan politik dibaca sebagai ukuran kecerdasan. Kedua, purifikasi relasi privat mengubah pilihan politik menjadi dasar penyaringan hubungan sosial. Ketiga, *schadenfreude* partisan memperlihatkan bagaimana empati

dapat terganggu ketika tragedi dibingkai melalui identitas politik. Keempat, delegitimasi simbolik memperluas permusuhan partisan ke institusi demokrasi. Keempat mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa polarisasi afektif bukan hanya persoalan sikap politik, tetapi juga praktik komunikasi yang membentuk cara warga menilai, menerima, atau menolak orang lain.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya memahami polarisasi digital tidak hanya sebagai persoalan disinformasi atau perbedaan opini, tetapi juga sebagai persoalan relasi sosial dan etika komunikasi. Literasi digital perlu diarahkan pada kemampuan membedakan kritik substantif dari penghinaan identitas, membedakan humor politik dari dehumanisasi, serta membedakan skeptisisme demokratis dari delegitimasi total terhadap institusi. Di sisi lain, tata kelola platform yang lebih transparan tetap penting dipertimbangkan agar percakapan politik tidak sepenuhnya bergantung pada logika keterlibatan emosional yang berpotensi memperkuat konflik.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi

politik digital dengan menunjukkan bahwa reply dan quote tweet bukan sekadar fitur teknis, melainkan ruang performatif tempat polarisasi afektif diproduksi dan dipertontonkan. Melalui dua fitur tersebut, pengguna tidak hanya menyampaikan pendapat politik, tetapi juga membangun batas moral, kognitif, sosial, dan institusional. Temuan ini memperlihatkan bahwa polarisasi afektif dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya tampak dalam pertentangan antarpending kandidat, tetapi juga dalam cara pengguna X membayangkan siapa yang layak dihormati, diajak berelasi, dipercaya, dan diakui sebagai bagian dari komunitas politik yang sah.

F. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa percakapan politik di platform X terkait Pemilihan Presiden 2024 memperlihatkan menguatnya polarisasi afektif dalam bentuk penilaian sosial terhadap kelompok politik lain. Berdasarkan analisis terhadap 58 kluster percakapan publik, polarisasi afektif tidak hanya muncul sebagai perbedaan dukungan terhadap kandidat, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang menilai kecerdasan, moralitas, empati, dan kelayakan sosial

seseorang berdasarkan pilihan politiknya.

Penilaian sosial tersebut tampil dalam rangkaian unggahan pemantik dan respons. Unggahan pemantik, seperti pertanyaan tentang pilihan dalam Pilpres 2024 atau kritik terhadap KPU dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, memancing respons yang tidak berhenti pada pendapat tentang kandidat atau prosedur, tetapi bergeser menjadi penilaian terhadap orang atau lembaga yang dibicarakan. Pada pola pertama, respons memakai label seperti "IQ 58", "goblok", dan "tolol" untuk merendahkan kapasitas berpikir kelompok lawan, sementara pilihan politik direduksi menjadi tanda motif yang dangkal. Pada pola kedua, respons menjadikan pilihan politik sebagai syarat kecocokan dalam hubungan, misalnya melalui ungkapan "skip" bagi pasangan yang tidak sejalan atau keputusan pertemanan yang disertai generalisasi moral terhadap "voters gemoy". Pada pola ketiga, gempap dijadikan bahan sindiran terhadap figur politik, dan sebagian pengguna menolaknya dengan alasan empati. Pada pola keempat, respons dalam kluster persidangan elektoral diarahkan pada lembaganya melalui plesetan seperti "Mahkamah Laundry

Suara", sebutan "Paman Usman di MK", dan tagar #BubarkanMK, sehingga yang diserang adalah keberadaan institusi dan bukan hanya putusannya.

Bentuk penilaian ini tampil melalui cara pengguna memanfaatkan fitur X. Reply menempatkan label dan sindiran langsung di bawah unggahan pemantik yang terbuka bagi publik, sedangkan quote tweet memungkinkan pengguna membingkai ulang unggahan tersebut di hadapan audiensnya sendiri. Dengan cara itu, penilaian atas kecerdasan dan moralitas kelompok lawan sekaligus menjadi penegasan identitas kelompok sendiri. Label dan tagar berfungsi sebagai penanda ringkas yang mudah dibagikan: "IQ 58" menandai kelompok lawan sebagai kurang cerdas, sedangkan #BubarkanMK menjadikan tuduhan terhadap satu lembaga tampil sebagai seruan yang dapat disebarkan pengguna lain. Data juga memperlihatkan respons tandingan, yaitu teguran terhadap candaan tragedi dan penolakan terhadap diskriminasi berdasarkan pilihan politik, sehingga ruang X tidak sepenuhnya homogen.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa polarisasi afektif di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan sikap politik, tetapi juga dengan pembentukan batas sosial antara in-group dan out-group. Reply dan quote tweet dalam platform X berfungsi sebagai ruang performatif tempat pengguna mempertontonkan loyalitas politik, mempermalukan lawan, menyaring relasi, dan membingkai institusi melalui bahasa sarkastik. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital kritis yang tidak hanya berfokus pada kemampuan memeriksa informasi, tetapi juga pada etika berkomunikasi dalam perbedaan politik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, korpus yang dianalisis berfokus pada klaster percakapan publik dengan intensitas

interaksi relatif tinggi, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh pengguna X di Indonesia. Kedua, data penelitian berupa teks reply dan quote tweet yang tampil di ruang publik, sehingga analisis ini membaca ekspresi komunikasi yang muncul dalam percakapan digital, bukan motivasi psikologis internal pengguna. Ketiga, penelitian ini tidak mengukur seberapa luas pola polarisasi afektif tersebar dalam populasi pengguna atau bagaimana algoritma platform memengaruhi visibilitas percakapan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, longitudinal, analisis jaringan, wawancara, atau *mixed methods* untuk menguji persebaran, perubahan, dan latar motivasional dari pola polarisasi afektif yang ditemukan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Au, C. H., & Ho, K. K. W. (2022). Online schadenfreude as an outcome of ideological polarization: A case in Hong Kong. *Online Information Review*, 46(4), 678-697. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/OIR-03-2021-0142>
- Bail, C. A. (2021). *Breaking the social media prism: How to make our platforms less polarizing*. Princeton University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589-597. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391-1412. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Eli J. Finkel et al. (2020). Political sectarianism in America. *Science*, 370, 533-536. <https://doi.org/https://doi.org/10.1126/science.abe1715>
- Forberg, P. L., & Schilt, K. (2023). What is ethnographic about digital ethnography? A sociological perspective. *Frontiers in Sociology*, 8(1156776). <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1156776>
- Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., & Ess, C. M. (2020). *Internet research: Ethical guidelines 3.0*. Association of Internet Researchers. Retrieved from <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>
- Grizzard, M., Frazer, R., & Monge, C. K. (2023). Demystifying schadenfreude: How disposition theorizing explains responses to social media stories of unvaccinated COVID-19 deaths. *New Media & Society*, 27(2), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14614448231184868>
- Gustin, F., Firmansyah, R., & Perdana, A. (2024). Echo chamber pada interaksi komentar di akun Instagram @turnbackhoaxid dalam konteks post-truth. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 262-283. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.6375>
- Haryanti, Y. (2025). Multimodal analysis on the construction of identity and ideology in the X (Twitter) account @DokterTifa. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 17(2), 309-332. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.12273>
- Hidayat, N. (2025). Memimpin dengan narasi populis: Analisis peran dan tindak komunikasi publik Presiden Indonesia. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 17(2), 231-251. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.10213>
- Huber, G. A., & Malhotra, N. (2017). Political homophily in social relationships: Evidence from online dating behavior. *The Journal of Politics*, 79(1), 269-283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/687533>
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United States. *Annual Review Political Science*, 22, 129-146. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>

- Khaq, I. S., & Wulandari, L. (2024). Framing and sentiment analysis of Gerindra Party political communication on Twitter (X) towards the 2024 elections. *Jurnal Wacana Politik*, 9(1), 1-10.
- Kozinets, R. V. (2019). *Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research*. Sage Publications. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003001430-2>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Lynch, M. P. (2018). Arrogance, truth and public discourse. *Episteme*, 15(3), 283-296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/epi.2018.23>
- Martel, C., Mosleh, M., Yang, Q., Zaman, T., & Rand, D. G. (2024). Blocking counter-partisan accounts drives political assortment on Twitter. *PNAS Nexus*, 3(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae161>
- Mason, L. (2018). *Uncivil agreement: How politics became our identity*. University of Chicago Press.
- Norris, P. (2023). Cancel culture: Myth or reality? *Political Studies*, 71(1), 145-174. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00323217211037023>
- Porter, T., & Schumann, K. (2018). Intellectual humility and openness to the opposing view. *Self and Identity*, 17(2), 139-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15298868.2017.1361861>
- Saragih, R. P., Ramadhan, W., & Firliani, A. (2025). Dinamika labeling "Anak Abah" sebagai kritik pemerintah di era media sosial. . *COMMTEMPORER: Jurnal Komunikasi Kontemporer*, 2(1), 69-83.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *The Social Psychology of Intergroup Relations*, 33-47.
- Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., ... Nyhan, B. (n.d.). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *William and Flora Hewlett Foundation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>